



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 64.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 40).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perubahan Renja:
  1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
    - a) Bagian Pemerintahan;
    - b) Bagian Hukum;
    - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - d) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - e) Bagian Administrasi Pembangunan;
    - f) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - g) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
    - h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
    - i) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Inspektorat.
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
  10. Dinas Kesehatan.
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  14. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

16. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
19. Dinas Pertanian.
20. Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan.
21. Dinas Perhubungan.
22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
23. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.
24. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.
25. Satuan Polisi Pamong Praja.
26. Kecamatan Parigi.
27. Kecamatan Cijulang.
28. Kecamatan Cimerak.
29. Kecamatan Cigugur.
30. Kecamatan Langkaplancar.
31. Kecamatan Mangunjaya.
32. Kecamatan Padaherang.
33. Kecamatan Kalipucang.
34. Kecamatan Pangandaran.
35. Kecamatan Sidamulih.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I. Pendahuluan;
    - 1.1.Latar Belakang
    - 1.2.Landasan Hukum
    - 1.3.Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
    - 1.4.Sistematika Penulisan
  - b. Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
    - 2.1.Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
    - 2.2.Permasalahan Yang Ada pada Perangkat Daerah
  - c. Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
    - 3.1.Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
  - d. Bab IV. Penutup
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 19 Agustus 2020  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 19 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 66.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001